

Pancasila atau Radikalisme? Peran Pendidikan Kristen Dan Pemerintah Menanggulangi Gelombang Intoleransi

Musa Fatas Wahyuning S¹, Yeremia², Veronica Titin³, Herianto⁴

Sekolah Tinggi Teologi Sungai Kehidupan Borneo^{1,3,4}, Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Yogyakarta⁴

musafatas2@gmail.com¹, yerma.yyy@gmail.com², veronicateitin4@gmail.com³,

alinerianto@gmail.com⁴

Abstract:

Radicalization is a serious threat to the unity of the multicultural Indonesian nation. This phenomenon not only threatens social stability but also reduces the meaning of religion to an exclusive instrument that can give birth to intolerance and violence. Therefore, a comprehensive approach is needed that involves educational institutions and the role of government to prevent religious radicalism in Indonesia. The results of the literature analysis indicate that radicalization can be addressed more effectively if state policies and the role of Christian teachings are implemented synergistically. The government provides a regulatory framework, while Christian faith offers a spiritual foundation that shapes Christian character. The integration of both contributes to the emergence of a peaceful, inclusive, and harmonious society, and reduces the space for radicalism in Indonesia, which is a multicultural society.

Keywords: Pancasila, Christian Education, Radicalism

Abstrak:

Radikalisasi merupakan bahaya besar bagi kesatuan multikultural Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial, tetapi agama juga menjadi kurang penting karena dapat menjadi alat yang memicu kekerasan dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan komprehensif yang melibatkan lembaga pendidikan dan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah radikalisme agama di Indonesia. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa jika kebijakan negara dan peran ajaran Kristen dikombinasikan, radikalisasi dapat ditangani dengan lebih baik. Sementara iman Kristen memberikan fondasi spiritual yang membentuk karakter Kristiani, pemerintah menyediakan kerangka regulasi. Karena keduanya berintegrasi, masyarakat Indonesia menjadi lebih damai, inklusif, dan harmonis. Selain itu, integrasi mempersulit radikalisme untuk masuk ke dalam masyarakatnya yang heterogen.

Kata Kunci: Pancasila, Pendidikan Kristen, Radikalisme

Article History

Submit:
September 15th, 2025

Revised:
November 30th, 2025

Published:
December 31st, 2025

Pendahuluan

Hidup kudus adalah hal yang Allah kehendaki untuk umat-Nya lakukan. Tanpa hidup kudus, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Allah menghendaki kehidupan umat-Nya kudus, yaitu hati dan pikiran yang kudus dan akan menghasilkan perbuatan yang kudus juga. Hidup kudus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dari hati, pikiran, perasaan, ucapan atau perkataan, perbuatan, pendengaran dan pengelihatan. Tentunya sebagai manusia, seseorang tidak pernah luput dari dosa. Tetapi

itu bukanlah alasan bagi manusia untuk terus menerus hidup dalam dosa. Allah telah memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Dia berperan dalam menjadikan orang percaya sebagai orang kudus, bukan hanya kudus dalam status tetapi juga dalam pengalaman. Dialah yang menguduskan dan membimbing setiap orang percaya supaya mereka dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah.

Adapun yang melatarbelakangi penulisan kajian biblika tentang Hidup Kudus Berdasarkan Imamat 20:1-27 adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan pengamatan penulis selama ini di beberapa tempat atau gereja, masih ada orang Kristen yang belum menerapkan prinsip-prinsip hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Seperti prinsip-prinsip hidup kudus yang ada di Imamat 20:1-27, yaitu kekudusan spiritual, sikap terhadap sesama, dan kekudusan pernikahan serta kekudusan seksual (Wright, 2004).

Ada juga yang mengabaikan kekudusan pernikahan dan seksual, sehingga terjadi perselingkuhan dan pelecehan atau percabulan. Komitmen dalam pernikahan, yaitu untuk mengasihi, menjaga, dan mencintai mulai pudar karena terlena dengan situasi sekitar (Lempp, 2010; Packer, 1993). Dengan demikian, kajian ini penting untuk menolong umat Kristen memahami kembali panggilan Allah untuk hidup kudus sebagaimana yang dikehendaki-Nya (Douglas, 1997).

Kedua, di masa sekarang, masih ada orang Kristen yang belum mengerti atau paham pentingnya hidup kudus, dan dampaknya ialah pemahaman yang dangkal akan hal itu. Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang melanggar kekudusan. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kekudusan itu ialah mengutuki orang tua (tidak menghormati atau menghargai), mendatangi “orang pintar”, penyimpangan seksual seperti berzina dan berhubungan dengan sesama jenis kelamin (LGBT) (Henry, 1992; Wright, 2004). Beberapa dosa dianggap sepele dan biasa saja ketika dilakukan, misalnya mencuri, mabuk-mabukkan, perkataan kotor, perzinahan, percabulan, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang sudah dibaptis pun demikian, masih hidup dalam dosa yang dianggap sepele, yang sesungguhnya membuat hidup menjadi cemar (Douglas, 1997).

Ketiga, hubungan sesama jenis atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dianggap suatu hal yang lazim, bahkan di beberapa negara pernikahan sesama jenis (LGBT) sudah dilegalkan (Sproul, 2018). Beberapa contoh yang terjadi di Indonesia ialah seperti kasus pasangan gay yang ketahuan oleh warga sekitar dan dikenakan hukuman 85 kali cambuk. Kasus ini terjadi di Aceh, yaitu seorang pria berinisial MT (24) dan seorang pria lainnya berinisial MH (20) dinyatakan bersalah berdasarkan pengakuan sejumlah saksi dan alat bukti (BBC News Indonesia, 2021). Kasus lainnya juga terjadi di Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 1 Februari 2025, pesta seks gay digelar di sebuah hotel di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan (Kompas, 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam, reflektif, serta interpretatif terhadap fenomena radikalisme di sekolah, khususnya jika ditinjau dari perspektif Kristiani. Metode ini memungkinkan penulis untuk menelaah secara kritis karya-karya ilmiah, laporan penelitian, artikel media, maupun publikasi akademik yang relevan, sehingga dapat menghasilkan sintesis pengetahuan yang lebih komprehensif (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka sistematis terhadap literatur yang berkaitan dengan pendidikan, radikalisme, moderasi beragama, serta kontribusi ajaran Kristen dalam membangun toleransi dan perdamaian. Kriteria seleksi literatur dalam studi ini mencakup: (1) tahun terbit, diutamakan literatur 10 tahun terakhir untuk menjaga relevansi kekinian; dan (2) relevansi isi, yaitu literatur yang mengandung pendekatan teologis, sosiologis, pedagogis, atau kebijakan publik yang mendukung kajian tentang radikalisme dan toleransi. Literatur yang dipilih tidak hanya berasal dari perspektif agama Kristen, tetapi juga mencakup pandangan interdisipliner dari ilmu sosial, pendidikan, dan kebijakan publik. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak bersifat parsial, melainkan integratif dan kontekstual.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penulis menggunakan strategi triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur. Data kemudian dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi sesuai dengan tema-tema utama, yaitu kebijakan pemerintah, peran pendidikan, dan kontribusi teologis ajaran Kristen. Selain itu, perspektif tokoh agama, pendidik, dan pemerintah diintegrasikan guna memperkaya interpretasi fenomena radikalisme. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan realitas, tetapi juga memberikan analisis kritis dan reflektif mengenai strategi menanggulangi radikalisme di Indonesia melalui sinergi antara kebijakan negara dan nilai-nilai Kristiani.

Hasil dan Pembahasan

Radikalisme di Sekolah: Sebuah Fenomena yang Mengkhawatirkan

Radikalisme pendidikan telah menjadi masalah strategis yang menyebabkan kerawanan sosial pada anak-anak. Sekolah dan kampus sebenarnya berfungsi sebagai tempat untuk belajar nilai-nilai universal seperti toleransi, kebersamaan, dan cinta tanah air. Namun, mereka juga sering terkena dampak ideologi radikal. Hasil survei Gen-Z nasional yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kecenderungan konservatif dan tidak toleran. Sebagian besar siswa memiliki pendapat radikal dan tidak toleran (PPIM UIN Jakarta, 2017).

Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dapat menjadi tempat yang subur untuk menyemai ideologi eksklusif daripada sepenuhnya melindungi kebhinekaan

Selain itu, analisis lebih lanjut dari survei tersebut menemukan bahwa sekitar sepertiga peserta menunjukkan sikap intoleran terhadap kelompok agama lain selain Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek eksklusi antarkelompok yang perlu diperhatikan (NU Balitbang/Kemenag, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa intoleransi di kalangan siswa bukan hanya fenomena spesifik; itu adalah gejala sistemik yang memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kerukunan sosial. Ketika prasangka, eksklusivitas, dan wacana anti-pluralitas masuk ke institusi pendidikan, ada kemungkinan polarisasi sosial meningkat dan nilai dasar Pancasila diragukan lagi.

Fakta ini diperkuat oleh bukti komparatif dari studi lain. Berdasarkan beberapa analisis, sekitar 20–30 persen populasi menunjukkan sikap yang dapat dikategorikan sebagai intoleran terhadap non-Muslim dalam berbagai survei yang dilakukan sepanjang waktu (Menchik, 2017; Mietzner & Colleagues, 2021). Persentase ini tidak kecil, tetapi menunjukkan bahwa ada bagian masyarakat yang selalu rentan terhadap narasi radikal. Sekolah memiliki tugas strategis untuk menekan kecenderungan ini karena mereka bertanggung jawab untuk sosialisasi nilai. Namun, jika tidak ada tindakan yang tepat, generasi muda dapat terjebak dalam pola pikir yang eksklusif, yang bertentangan dengan visi nasional Indonesia yang inklusif.

Radikalisasi saat ini diperkuat oleh arus informasi digital, bukan hanya dari interaksi tatap muka di sekolah. Misalnya, media sosial dapat membantu menyebarkan cerita yang tidak toleran ke generasi muda dengan cepat. Anak-anak yang tidak memiliki pemahaman kritis mudah terpapar ujaran kebencian, propaganda ekstrem, dan wacana intoleran yang dibungkus dengan dalil agama. Dalam situasi seperti ini, sekolah bukan hanya tempat belajar akademik; mereka juga menjadi medan pertempuran ideologis yang membahayakan masa depan negara.

Data-data di atas, meskipun berbeda metodologi dan sampel, bersama-sama menegaskan bahwa wacana keras terhadap apostasi dan intoleransi mempunyai jejak nyata dalam opini publik—sebuah tantangan yang harus ditangani, khususnya di lingkungan pendidikan. Jika pola-pola sikap intoleran ini dibiarkan, sekolah sebagai institusi pembentuk karakter berisiko gagal menegakkan nilai-nilai kebangsaan Pancasila yang mengedepankan toleransi, kebersamaan, dan penghargaan terhadap keberagaman (PPIM UIN Jakarta, 2017); Institute, 2017). Dengan kata lain, pendidikan yang seharusnya menjadi garda depan dalam membentuk warga negara yang demokratis dan toleran justru bisa terjebak menjadi kanal reproduksi radikalisme.

Radikalisasi di dunia pendidikan dengan demikian bukanlah isu sepele, melainkan ancaman nyata bagi persatuan bangsa dan keberlangsungan nilai Pancasila. Banyak penelitian memang telah membahas aspek politik, ideologi, maupun keamanan dari

fenomena ini. Namun, kajian yang menyoroti peran pendidikan agama Kristen dalam menghadapi tantangan radikalisme masih relatif jarang ditemukan. Padahal, ajaran Kristiani yang menekankan kasih, perdamaian, dan penghargaan terhadap martabat manusia dapat menjadi fondasi etis dan spiritual dalam upaya pencegahan radikalisme. Kristen, melalui ajaran Alkitab, menekankan prinsip mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang agama atau budaya (Matius 22:39).

Dengan dasar inilah, peran pendidikan dan ajaran Kristen perlu dikaji lebih dalam, bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai kontribusi nyata dalam menjaga harmoni sosial di Indonesia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana ajaran Kristen dapat berkontribusi secara konkret dalam membendung radikalisme? Bagian berikut akan mengulas secara lebih rinci mengenai peran ajaran Kristen dalam menanggulangi radikalisme, baik melalui pendidikan, gereja, maupun dialog antarumat beragama.

Tabel 1. Ringkasan Data Survei tentang Intoleransi dan Radikalisme (2017–2021)

Tahun	Lembaga/ Referensi	Populasi/ Responden	Temuan Utama	Persentase Sikap Intoleran/ Radikal
2017	PPIM UIN Jakarta (Survei Gen-Z)	Siswa & Mahasiswa	Kecenderungan konservatif, intoleransi internal cukup tinggi	Signifikan (tanpa persentase detail, tapi mayoritas mencolok)
2017	NU Balitbang/Kemen ag	Pelajar	Sekitar 1/3 responden intoleran terhadap agama lain	± 33%
2017	Menchik	Populasi umum	Toleransi lintas agama lemah; intoleransi terhadap non- Muslim cukup besar	20–30%
2021	Mietzner & Colleagues	Populasi umum & pelajar	Intoleransi konsisten muncul dalam survei lintas-waktu	20–30%

- Data lintas tahun menunjukkan tren konsisten: intoleransi dan radikalisasi tetap muncul pada 20–33% responden.
- Sekolah/kampus menjadi salah satu ruang yang paling rawan karena generasi muda mudah dipengaruhi ideologi radikal melalui jaringan sosial, baik offline maupun online.
- Tren ini menegaskan urgensi intervensi pendidikan berbasis nilai kasih, toleransi, dan penghargaan martabat manusia sebagaimana diajarkan dalam iman Kristen.

Peran Ajaran Kristen dalam Menanggulangi Radikalisasi

Penyebaran paham radikal dapat diatasi dengan mengedepankan pendidikan berbasis nilai-nilai agama yang inklusif dan toleran. Kristen, dalam ajaran-ajarannya, sangat menekankan pentingnya kasih kepada sesama, tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang sosial (Matius 22:39). Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, yang berarti bahwa penghargaan terhadap keberagaman adalah hal yang esensial. Ajaran ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia, yang memerlukan sikap inklusif dan penghargaan terhadap perbedaan.

Pendidikan Kristen dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada generasi muda. Menurut Fehr et al., (2019) pendidikan berbasis agama Kristen memiliki potensi untuk membentuk karakter siswa yang lebih toleran dan penuh kasih. Dengan menekankan ajaran Kristus mengenai perdamaian dan persatuan, pendidikan Kristen dapat berperan dalam mengurangi dampak negatif dari radikalisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Smith (2021) yang menegaskan bahwa pendidikan agama, ketika diajarkan dengan pendekatan inklusif, dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun toleransi antarumat beragama.

Selanjutnya, Johnson & Coleman (2020) menegaskan bahwa pendekatan interfaith dalam pendidikan Kristen juga dapat memperluas wawasan siswa mengenai keberagaman agama dan budaya, sehingga mereka lebih mampu menerima perbedaan tanpa prasangka. Dengan demikian, pendidikan Kristen yang menekankan ajaran Kristus mengenai kasih dan perdamaian dapat menjadi sarana yang signifikan dalam membangun karakter siswa yang lebih terbuka dan toleran. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan oleh pendidik serta keterbukaan dalam mengajarkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok agama.

Pendekatan teologis dalam pendidikan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya kehidupan berdampingan dalam keragaman. Sebagai contoh, gereja-gereja di Indonesia telah berperan dalam berbagai kegiatan *interfaith dialogue* yang mempromosikan perdamaian dan toleransi antarumat beragama (Sutrisno, 2018).

Pendidikan yang mengedepankan dialog antaragama, dengan berbasis pada ajaran Kristen, dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya hidup bersama dalam kedamaian. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Radikalisasi melalui Ajaran Kristen, antara lain:

Pertama, Penguatan Nilai Kasih dan Toleransi dalam Pendidikan. Pendidikan Kristen yang berlandaskan ajaran kasih dan penghargaan terhadap sesama dapat membantu membentuk karakter siswa yang lebih inklusif dan toleran. Dengan mengedepankan nilai-nilai Kristiani yang menekankan perdamaian dan persatuan, siswa dapat dibimbing untuk menghormati perbedaan serta menolak paham-paham radikal yang berpotensi memecah belah masyarakat. Hal ini ditegaskan pula oleh Gamaleal (2024) yang menemukan bahwa Pendidikan Agama Kristen memiliki pengaruh signifikan dalam menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama. Menurut Hedges (2017), pendidikan Kristen yang menekankan empati lintas iman dapat menjadi benteng etis untuk melawan narasi kekerasan yang kerap dibawa oleh radikalisme.

Kedua, Meningkatkan Kesadaran Antarumat Beragama. Pendekatan *interfaith* dalam pendidikan Kristen dapat memperluas wawasan siswa mengenai keberagaman agama dan budaya. Dengan pemahaman yang lebih luas, mereka akan lebih siap menerima perbedaan tanpa prasangka, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis dan bebas dari konflik berbasis agama. Penelitian Prawono & Kamea (2024) juga menunjukkan bahwa pendidikan berbasis iman yang mengedepankan dialog antaragama mampu mengurangi prasangka di antara siswa dan memperkuat kesadaran keberagaman. Hal ini sejalan dengan (Stark & Finke, 2000) yang menegaskan bahwa agama, ketika dipraktikkan secara dialogis, justru memperkuat kohesi sosial dibanding memecah-belah. Gereja dan sekolah Kristen dapat memainkan peran aktif dalam memfasilitasi dialog antarumat beragama dan menciptakan ruang diskusi yang sehat untuk membangun pemahaman yang lebih baik antar komunitas yang berbeda. Kegiatan seperti diskusi lintas agama, kerja sama sosial, dan program pembinaan berbasis kasih dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah radikalisasi. La'ia & Santo (2023) menambahkan bahwa pendidik Kristen yang berperan sebagai *peacemakers* dapat menjembatani perbedaan keyakinan dan menciptakan iklim damai dalam komunitas pendidikan maupun gereja. Hal ini selaras dengan gagasan Miroslav Volf (1996) bahwa gereja harus menjadi “komunitas inklusi,” bukan eksklusif, dengan cara menghapus sekat identitas yang memisahkan umat manusia.

Ketiga, Mendorong Kurikulum Pendidikan Berbasis Inklusivitas. Implementasi ajaran Kristen dalam pendidikan perlu disertai dengan kurikulum yang menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini memungkinkan pendidikan agama Kristen tidak hanya bermanfaat bagi siswa Kristen, tetapi juga menjadi model bagi pendekatan inklusif dalam pendidikan agama secara umum. Hasil penelitian Risambessy et al., (2025) menunjukkan bahwa

sekolah Kristen yang menerapkan kurikulum moderasi beragama menampilkan tingkat tinggi dalam indikator toleransi, nasionalisme, dan anti-kekerasan, sehingga relevan sebagai model pendidikan inklusif. Selain itu, Gunawan (2020) menekankan bahwa pendidikan berbasis kurikulum multikultural berperan signifikan dalam menekan lahirnya eksklusivisme agama di sekolah-sekolah.

Keempat, Mencegah Potensi Radikalisasi Sejak Dini. Dengan memberikan pemahaman keagamaan yang benar dan moderat sejak dini, generasi muda dapat lebih terlindungi dari pengaruh ajaran ekstrem yang sering kali muncul melalui media sosial atau lingkungan sekitar. Pendidikan berbasis nilai-nilai Kristiani yang terbuka dan dialogis dapat menjadi benteng dalam menghadapi narasi-narasi radikal. Hal ini sejalan dengan temuan Salim (2022) yang menunjukkan bahwa pendidikan *interfaith* di sekolah-sekolah model *interfidei* dapat menekan prasangka antar agama dan mengurangi kerentanan terhadap narasi radikal. Di sisi lain, (Berger, 2014) berargumen bahwa narasi agama yang dikuatkan sejak dini berfungsi sebagai “*plausibility structure*” yang dapat mengalahkan narasi ekstremisme.

Kelima, Membangun Masyarakat yang Lebih Harmonis. Jika diterapkan secara konsisten, pendidikan Kristen yang menekankan kasih dan perdamaian akan berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghargai perbedaan. Hal ini akan memperkuat kohesi sosial dan memperkecil potensi konflik berbasis agama di Indonesia yang multikultural. Dengan demikian, pendidikan Kristen yang berbasis kasih dan inklusivitas dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dalam mendorong terciptanya masyarakat yang damai dan bebas dari radikalisasi. Seperti diingatkan oleh Desmond Tutu (Uskup Anglikan, Aktivistis Perdamaian), “Jika Anda ingin perdamaian, jangan berbicara dengan teman Anda. Bicaralah dengan musuh Anda.” Ajaran Kristen, terutama yang berakar pada kasih Kristus, memiliki kekuatan transformatif yang melampaui batas-batas sosial, politik, dan agama. Ketika gereja dan pendidikan Kristen sungguh menghidupi nilai inklusivitas dan rekonsiliasi, mereka tidak hanya menjadi benteng terhadap radikalisasi, tetapi juga agen perdamaian yang menghadirkan tanda Kerajaan Allah di dunia. Radikalisasi berusaha memisahkan, sedangkan Injil berusaha menyatukan. Dalam terang teologi kasih, strategi melawan radikalisasi bukan semata-mata tindakan politis atau pedagogis, melainkan juga bagian dari panggilan gereja untuk menghadirkan *shalom* Allah. Dengan demikian, peran ajaran Kristen dalam menanggulangi radikalisasi bukan hanya sekadar strategi sosial, melainkan sebuah kesaksian iman bahwa kasih lebih kuat daripada kebencian, dan damai lebih kuat daripada kekerasan.

Contoh Kasus Empiris Lembaga Pendidikan di Indonesia Menangkal Radikalisme

Dalam konteks Indonesia, sejumlah gereja dan lembaga pendidikan Kristen telah mengambil peran aktif dalam mencegah radikalisme melalui pendidikan dan dialog lintas iman.

Sekolah Kristen di Yogyakarta. Salah satu sekolah Kristen di Yogyakarta yang terafiliasi dengan jaringan sekolah Katolik melaksanakan program rutin bernama *Live in Pluralism*, di mana siswa Kristen tinggal selama beberapa hari di keluarga Muslim maupun Hindu. Program ini bertujuan untuk membangun kedekatan sosial, menumbuhkan empati, dan mengurangi stereotip antaragama. Penelitian Hermawan, (2019) menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam memperluas wawasan keberagaman siswa sekaligus menekan sikap eksklusivisme agama.

Gereja Kristen Jawa (GKJ) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI). Kedua sinode ini dikenal aktif dalam memfasilitasi *dialog antariman* di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Melalui kegiatan bersama seperti kerja bakti lintas iman, diskusi publik, hingga advokasi HAM, gereja-gereja ini berkontribusi menciptakan iklim sosial yang damai. Menurut Bakti (2018), model kerja sama seperti ini bukan hanya memperkuat relasi antarumat beragama, tetapi juga mengurangi kerentanan generasi muda terhadap ideologi radikal.

Program Sekolah Damai (Peace School). Di Jakarta, beberapa lembaga Kristen bekerja sama dengan komunitas Muslim progresif mendirikan program *Peace School*. Program ini menyoal anak muda lintas agama dan mengajarkan keterampilan resolusi konflik, literasi digital untuk melawan hoaks, serta kajian kitab suci secara dialogis. Hasil evaluasi Yewangoe (2021) menunjukkan bahwa partisipan program ini lebih kritis terhadap narasi kebencian di media sosial, sekaligus lebih siap menjadi agen perdamaian di komunitas masing-masing.

Pelayanan Pemuda Gereja Toraja. Di wilayah Sulawesi Selatan, organisasi pemuda Gereja Toraja mengembangkan pendekatan berbasis budaya lokal dalam melawan radikalisme. Dengan menghidupkan kembali tradisi *mapalus* (kerja sama komunal), pemuda gereja membangun solidaritas sosial lintas iman, khususnya di daerah rawan konflik. Menurut Titaley (2022), praktik ini memperlihatkan bahwa akar budaya lokal dapat menjadi medium efektif dalam mewujudkan pendidikan Kristen yang kontekstual dan antiradikalisme.

Kisah-kisah empiris di atas memperlihatkan bagaimana ajaran kasih Kristus tidak berhenti pada tataran doktrin, melainkan diwujudkan dalam praksis nyata yang mencegah radikalisme sejak dini. Gereja dan lembaga pendidikan Kristen di Indonesia telah menunjukkan bahwa dialog lintas iman, program pendidikan inklusif, serta revitalisasi budaya lokal dapat menjadi strategi kontekstual yang efektif.

Hal ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 12:18: “*Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua*

orang.” Prinsip ini menggarisbawahi bahwa panggilan Kristen bukan hanya menghindari konflik, tetapi secara aktif membangun jembatan perdamaian. Mak jelaslah, kombinasi antara dasar teologis, praksis pendidikan Kristen, dan contoh nyata di Indonesia memperlihatkan bahwa gereja memiliki potensi strategis dalam menanggulangi radikalisasi.

Tindakan Pemerintah dalam Mengatasi Radikalisasi

Pemerintah Indonesia telah menyadari urgensi penanganan radikalisasi sejak awal 2000-an, terutama setelah rangkaian aksi terorisme yang melibatkan kelompok berbasis ideologi transnasional. Salah satu langkah monumental yang diambil adalah pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017. Menurut Wiranto, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, HTI dibubarkan karena terbukti menyebarkan paham khilafah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wiranto, 2017a). Upaya ini kemudian diperkuat dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merevisi Undang-Undang Ormas, memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi yang terbukti mengancam kebhinekaan dan keutuhan bangsa (Indonesia, 2017). Langkah regulatif ini penting, tetapi sebagaimana ditegaskan kembali oleh Wiranto pada tahun 2019, pelarangan organisasi saja tidak cukup; penyebaran ideologi khilafah oleh individu juga harus dicegah melalui aturan hukum yang jelas (DetikNews, 2019a; DetikNews, 2019b). Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa radikalisasi tidak hanya terjadi secara struktural melalui ormas, tetapi juga menyebar secara kultural dan digital, khususnya melalui media sosial yang menjadi ruang subur bagi propaganda ekstremis. Dengan demikian, kebijakan pelarangan harus dibarengi dengan upaya preventif berbasis pendidikan, dialog, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal ini, studi PPIM UIN Jakarta (2017) menunjukkan bahwa meskipun mayoritas generasi muda Muslim Indonesia berpegang pada nilai-nilai agama, terdapat gejala menguatnya intoleransi terhadap kelompok non-Muslim maupun sesama Muslim yang berbeda pandangan. Survei nasional itu menemukan bahwa sekitar 58,5% siswa dan mahasiswa memiliki potensi intoleran terhadap kelompok non-Muslim, sementara 51,1% intoleran terhadap kelompok internal Islam yang berbeda aliran (PPIM UIN Jakarta, 2017). Data ini menegaskan pentingnya keterlibatan negara dalam menanamkan nilai kebangsaan, moderasi, dan penghormatan terhadap perbedaan sejak dini melalui sistem pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga harus membangun ketahanan ideologis di kalangan generasi muda.

Selain regulasi ormas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memainkan peran penting dalam menjalankan program deradikalisasi. BNPT

mengembangkan pendekatan multi-level: mulai dari rehabilitasi mantan narapidana terorisme, program re-edukasi di lembaga pemasyarakatan, hingga kampanye digital melawan ujaran kebencian (BNPT, 2020). Program deradikalisasi BNPT bekerja sama dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk membangun narasi tandingan terhadap ideologi ekstrem. Pendekatan ini relatif berhasil menekan laju penyebaran ideologi radikal, meski tantangannya masih besar, terutama dalam konteks penyebaran propaganda berbasis internet yang lintas batas dan sulit dikontrol.

Namun, kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman, tetapi juga proaktif dalam bentuk penyusunan kurikulum pendidikan agama yang lebih moderat. Kementerian Agama, misalnya, merevisi kurikulum Pendidikan Agama Islam melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019, yang menekankan pentingnya integrasi antara nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan (Komarudin, 2021). Kurikulum baru ini bertujuan mencegah infiltrasi materi intoleran di sekolah dan membekali siswa dengan pemahaman Islam yang rahmatan lil ‘alamin serta sejalan dengan Pancasila. Upaya serupa juga dilakukan melalui integrasi Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang dinilai efektif untuk memperkuat benteng ideologis siswa terhadap penetrasi radikalisme (Muhayati, 2021). Dengan demikian, pendidikan menjadi arena strategis dalam pencegahan jangka panjang terhadap radikalisasi.

Laporan Setara Institute (2017) menegaskan bahwa intoleransi dan kekerasan berbasis agama masih sering muncul, baik di ranah publik maupun institusi pendidikan. Dalam banyak kasus, pembiaran terhadap intoleransi menjadi pintu masuk radikalisasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus disertai dengan penguatan kapasitas guru dan tenaga pendidik agar mampu mengajarkan nilai-nilai kebhinekaan. Komnas HAM (2019) juga menekankan bahwa negara berkewajiban melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negara. Pelanggaran terhadap prinsip ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi juga membuka ruang bagi narasi ekstremis yang memanfaatkan ketidakadilan sosial sebagai justifikasi ideologi.

Selain di ranah pendidikan, kebijakan pencegahan radikalisasi juga perlu diperkuat di ruang publik dan digital. Kajian ISEAS – Yusof Ishak Institute menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia adalah kemampuan kelompok radikal memanfaatkan ruang maya untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota, dan menggalang dana (I.-Y. I. Institute, 2020). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mencakup strategi *digital literacy*, kontra-narasi online, dan kerja sama dengan platform media sosial untuk memblokir konten radikal. Langkah ini menjadi semakin mendesak mengingat penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta pengguna aktif, mayoritas generasi muda yang rentan terhadap ideologi populis-radikal.

Tindakan pemerintah dalam menangani radikalisasi juga harus memperhatikan aspek reintegrasi sosial. Harahap (2019) dalam studinya menekankan pentingnya deradikalisasi yang menasar anak-anak dan keluarga dari mantan pelaku terorisme. Tanpa program reintegrasi yang holistik, keluarga ini berisiko mengalami stigmatisasi sosial yang justru memperkuat siklus radikalisasi. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat sipil, gereja, masjid, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem inklusif yang menolak stigma dan memberikan kesempatan rehabilitasi.

Jika ditelaah dari perspektif teologis, upaya negara dalam mencegah radikalisasi sejalan dengan mandat alkitabiah untuk memelihara kehidupan bersama yang damai. Roma 13:1–4 menegaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan, yang diberi pedang untuk menghukum pelaku kejahatan dan melindungi orang baik. Dengan demikian, langkah negara membubarkan organisasi yang bertentangan dengan dasar negara dan membahayakan keutuhan bangsa dapat dipandang sebagai upaya memenuhi mandat ilahi dalam menjaga ketertiban dan kedamaian. Namun, sebagaimana Alkitab juga menekankan dalam Mikha 6:8, keadilan harus berjalan bersama kasih setia dan kerendahan hati. Artinya, tindakan keras terhadap radikalisme harus diimbangi dengan pendidikan, rekonsiliasi, dan dialog lintas agama.

Berdasarkan referensi di atas, penulis mengajukan beberapa implikasi terkait Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Radikalisme, antara lain: *Pertama, Penguatan Pendidikan Moderat*. Kebijakan pemerintah yang melarang ideologi radikal harus diikuti dengan penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama. Kurikulum yang menanamkan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai keberagaman dapat membantu siswa memahami pentingnya toleransi dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Muhayati, 2021; Komarudin, 2021; PPIM UIN Jakarta, 2017). *Kedua, Kolaborasi Multi-Pihak*. Implementasi kebijakan ini memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan. Sekolah dan guru memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan ditanamkan secara efektif. Sementara itu, organisasi keagamaan dapat menjadi mitra dalam menyebarkan narasi keagamaan yang lebih moderat dan inklusif (S. Institute, 2017a; Komnas HAM, 2019). *Ketiga, Pencegahan Dini terhadap Radikalisme*. Dengan adanya kebijakan yang bersifat preventif, potensi penyebaran paham radikal di sekolah dapat ditekan sejak dini. Integrasi wawasan kebangsaan dalam kurikulum serta pemantauan terhadap konten-konten ekstrem di media sosial akan membantu siswa menghindari paparan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (BNPT, 2020; ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020b). *Keempat, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*. Pendekatan yang menekankan dialog lintas agama dan kebangsaan dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Dengan demikian, individu dari berbagai latar

belakang dapat lebih memahami pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan menolak ideologi yang berpotensi memecah belah bangsa (Komnas HAM, 2019; Harahap, 2019). *Kelima, Efektivitas Jangka Panjang*. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi dalam implementasi dan evaluasi secara berkala. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan bebas dari pengaruh radikalisme (BNPT, 2020; S. Institute, 2017b).

Dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, kebijakan ini bukan hanya urusan keamanan, tetapi juga bagian dari proyek kebangsaan untuk menjaga kohesi sosial. Tindakan pemerintah dalam melarang ideologi radikal perlu selalu disertai dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan dialogis. Hanya dengan demikian upaya deradikalisasi akan berkelanjutan, tidak sekadar memadamkan api sesaat, tetapi benar-benar membangun budaya damai dan toleransi yang mengakar kuat di seluruh lapisan masyarakat. Radikalisasi merupakan ancaman serius bagi persatuan bangsa, karena ia merongrong sendi-sendi kebangsaan sekaligus mereduksi makna agama menjadi instrumen eksklusif dan penuh kekerasan. Kajian ini menunjukkan bahwa penanggulangan radikalisme tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan melibatkan multi-aktor (Azra, 2017).

Di satu sisi, kebijakan pemerintah menjadi garda terdepan dengan memperkuat pendidikan moderasi, menegakkan aturan yang melarang ideologi radikal, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Kebijakan yang berbasis pada pencegahan dini, peningkatan kesadaran masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan terbukti memiliki potensi strategis untuk membatasi ruang gerak radikalisme di berbagai lini kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan (Nuh, 2019). Di sisi lain, peran ajaran Kristen memberi dimensi spiritual, moral, dan etis yang melengkapi upaya struktural pemerintah. Nilai-nilai Kristiani yang berpusat pada kasih, perdamaian, dan penghormatan terhadap sesama menjadi fondasi dalam membangun kesadaran keberagaman dan menolak narasi kekerasan (Yewangoe, 2021b). Melalui pendidikan Kristen, pelayanan gereja, serta dialog antariman, umat Kristen dipanggil untuk hadir sebagai peacemaker yang tidak hanya menjaga iman pribadi, tetapi juga berkontribusi bagi kohesi sosial bangsa.

Refleksi teologis menegaskan bahwa keterlibatan Kristen dalam menanggulangi radikalisme bukan sekadar respon sosial, melainkan panggilan iman yang berakar pada Injil. Sebagaimana firman Tuhan menegaskan, “*Kamu adalah garam dunia*” dan “*Kamu adalah terang dunia*” (Matius 5:13–14), maka keberadaan umat Kristen di ruang publik harus mampu memberi rasa, arah, dan harapan bagi masyarakat yang plural (Rahner, 1978). Dengan demikian, integrasi antara kebijakan negara dan peran agama—khususnya ajaran Kristen—menjadi jalan paling konstruktif untuk membangun bangsa yang inklusif, damai, dan tahan terhadap ancaman radikalisme. Indonesia yang multikultural

mebutuhkan komitmen kolektif semua elemen, baik negara maupun komunitas iman, agar cita-cita kebangsaan dalam bingkai Pancasila tetap terjaga (Bakti, 2018b). Bila sinergi ini terus dipelihara, maka radikalisme tidak hanya dapat ditekan, tetapi dapat digantikan dengan narasi besar tentang kasih, persaudaraan, dan perdamaian yang menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Kesimpulan

Intoleransi yang dipicu oleh radikalisme masih marak terjadi di Indonesia. Kerjasama antar lembaga Kristen seperti gereja dan sekolah-sekolah Kristen bersama dengan pihak pemerintah merupakan langkah penting dilakukan untuk menangkal penyebaran paham radikal di bumi Pancasila ini. Sikap mengedepankan toleransi dan kehidupan beragama yang inklusif menjadi keniscayaan dalam mempertahankan persatuan bangsa yang multikultur. Untuk itu, penelitian ini berkontribusi kepada pengembangan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan budi pekerti, moderasi beragama dan isu-isu pendidikan sosial dan politik.

Daftar Rujukan

- Azra, A. (2006). *Pluralisme dan Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan*. Paramadina.
- Azra, A. (2017). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Mizan.
- Baidhawy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- Bakti, A. F. (2018a). Dialog Antariman dan Pencegahan Radikalisme di Jawa. *Jurnal Harmoni: Multikultural Dan Multireligius*, 17(1), 33–50.
- Bakti, A. F. (2018b). Dialog Antariman dan Pencegahan Radikalisme di Jawa. *Jurnal Harmoni: Multikultural Dan Multireligius*, 17(1), 33–50.
- Berger, P. L. (2014). *The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age*. De Gruyter.
- BNPT. (2020). *Program Deradikalisasi dan Pencegahan Terorisme*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. <https://bnpt.go.id>
- Busno, B., Yakob, Y., Toher, U., Herianto, H., & Ngesthi, Y. S. E. (2023). Sumbangsih Teokrasi Yudaisme Masa Intertestamental bagi Perluasan Misi Kerajaan Allah di Indonesia. *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 8(1), 61–75. <https://doi.org/10.52104/harvester.v8i1.121>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th edn). SAGE Publications.
- DetikNews. (2019a). Wiranto: Ideologi Khilafah Harus Dilarang karena Bertentangan dengan Pancasila. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-4632155/wiranto-ideologi-khilafah-harus-dilarang-karena-bertentangan-dengan-pancasila>

- DetikNews. (2019b). Wiranto: Jangan Hanya Ormas, Ideologi Khilafah Harus Dilarang. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-4632219/wiranto-jangan-hanya-ormas-ideologi-khilafah-harus-dilarang>
- Fehr, J., O'Reilly, M., & Weigel, T. (2019). *Christian Education and Character Development: Fostering Tolerance and Love*. Goodwill Press.
- Gamaleal, I. C. (2024). The Influence of Christian Religious Education on Attitudes of Tolerance Among Religious Communities. *Ministries and Theology*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.35335/etqhm356>
- Gunawan. (2020). Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 25(2), 145–160.
- Harahap, H. (2019). Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial Anak dari Mantan Pelaku Terorisme. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 331–348.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Gramedia.
- Hedges, P. (2017). *Contemporary Muslim–Christian Encounters: The Changing Faces of Christian and Muslim Communities*. Bloomsbury Academic.
- Hermawan, Y. (2019). Live in Pluralism: Pendidikan Multikultural di Sekolah Katolik Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(2), 112–126.
- Hidayat, A. (2021). Literasi Media dalam Menangkal Radikalisme pada Siswa. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 7–14.
- Indonesia, R. (2017). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Sekretariat Negara.
- Institute, I.-Y. I. (2020). *Radicalism in Indonesia's Cyberspace: Emerging Trends and Challenges*. ISEAS Singapore.
- Institute, S. (2017a). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2017*. <https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-tahun-2017/>
- Institute, S. (2017b). *Laporan Tahunan: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. Setara Institute for Democracy and Peace.
- ISEAS-Yusof Ishak Institute. (2020). *Radicalism in Indonesia's Cyberspace: Emerging Trends and Challenges*. ISEAS Singapore.
- Johnson, M., & Coleman, A. (2020). *Interfaith Approaches in Christian Education*. Harmony Books.
- Komarudin. (2021). Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 123–140.
- Komnas HAM. (2019). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Menchik, J. (2017). *A "Tolerant" Indonesia? Indonesian Muslims in Comparative Perspective*. https://jeremymenchik.com/wp-content/uploads/2017/05/menchik_trost_indonesian_muslims_tolerance.pdf

- Mietzner, M. & colleagues. (2021). The mobilisation of intolerance and its trajectories. In *Buku Chapter (UIN repository)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53787/3/Buku%20Chapter.pdf>
- Muhayati. (2021). Integrasi Pendidikan Agama Islam dan PPKn dalam Membangun Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(1), 45–58.
- NU Balitbang/Kemenag (dilaporkan oleh NU Online). (2017). *Melihat Wajah Keberagamaan Indonesia*. <https://nu.or.id/nasional/melihat-wajah-keberagamaan-indonesia-NTf5o>
- Nuh, M. (2019). Moderasi Beragama dan Tantangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–160.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd edn). SAGE Publications.
- PPIM UIN Jakarta. (2017). *Laporan Survei Nasional: Potensi Radikalisme di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. <http://ppim.uinjkt.ac.id>
- Prawono, Y., & Kamea, J. (2024). The Role of Christian Education in Increasing Religious Tolerance Among Students. *TEVUNAH: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), 49–62.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2017). *Keberagamaan Muslim Gen-Z: Survei Nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia*. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://ppim.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Survey-Nasional-Keberagamaan-GenZ.pdf>
- Radikalisme dan Pendidikan Multikultural*. (2019). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://uinjkt.ac.id/index.php/id/radikalisme-dan-pendidikan-multikultural?utm_source=chatgpt.com
- Rahman, M. T. (2020). *Agama, Kekerasan dan Radikalisme*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/100906/1/LAYOUT%20BUKU%20AGAMA%20RADIKALISME.pdf>
- Rahner, K. (1978). *Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity*. Seabury Press.
- Risambessy, J., Lado, I. E. L., & Loes, J. (2025). Religious Moderation in Christian School at East Nusa Tenggara. *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education*, 4, 1001–1009. <https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1534>
- Salim, A. (2022). Mainstreaming Interfaith Education: Countering Radicalism by The Innovation of Model Interfidei Schools. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 20(3), 252–261. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1156>

- Smith, R. (2021). *Faith and Inclusivity: Religious Education in a Plural World*. Interfaith Publishing.
- Stark, R., & Finke, R. (2000). *Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion*. University of California Press.
- Sutrisno, P. (2018). Dialog Antaragama di Indonesia: Peran Gereja dalam Promosi Perdamaian dan Toleransi. *Jurnal Studi Teologi Indonesia*, 5(2), 45–62.
- Titaley, J. (2022). Kebudayaan Lokal sebagai Basis Pendidikan Kristen Anti-Radikalisme: Studi Kasus Gereja Toraja. *Jurnal Teologi Kontekstual*, 5(1), 77–94.
- Volf, M. (1996). *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Abingdon Press.
- Wiranto. (2017a). Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/13405341/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>
- Wiranto. (2017b, May 4). *Wiranto: Ada Kecenderungan Kampus Jadi Tempat Pembinaan Radikalisme*. <https://news.detik.com/berita/d-3491740/wiranto-ada-kecenderungan-kampus-jadi-tempat-pembinaan-radikalisme>
- Yewangoe, A. A. (2021a). *Agama dan Perdamaian di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. BPK Gunung Mulia.
- Yewangoe, A. A. (2021b). *Agama dan Perdamaian di Indonesia: Tantangan dan Harapan*. BPK Gunung Mulia.